



Nama Formulir:

**Lembar  
Pengesahan  
Karya Ilmiah**

No.

FR-003/PR-003/KB-02-  
01/MMP/UPM/2020

Issue/Revisi

1

Tgl Berlaku

15 Juli 2020

Halaman

1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap	Dr. Herdi Tri Nurwanto, M.M
Jabatan	Dosen
Program Studi	Magister Ilmu Agama Islam
NIP	211070224

Telah melakukan penelaahan karya ilmiah berjudul:

Analisis Historis Konflik Partai Masyumi dengan Partai Komunis Indonesia (1946–1955)

Dan menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut sudah memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan oleh karenanya layak diajukan untuk keperluan unggah karya ilmiah di Universitas Paramadina, atas nama:

Nama Lengkap	Hikmat Maswara
Jenjang	S4 / S2 *
Program Studi	Magister Ilmu Agama Islam
NIM	221241003

Demikian hasil penelaahan atas karya ilmiah ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 18 Januari 2024

Penelaah,

Dr. Herdi Tri Nurwanto, M.M

NIP: 211070224



Nama Formulir:

**Surat Pernyataan dan Validasi**

No.

FR-002/PR-003/KB-02-01/MMP/UPM/2020

Issue/Revisi

1

Tgl Berlaku

15 Juli 2020

Halaman

1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap Hikmat Maswara  
Jenjang S1/ S2 \*  
Program Studi Magister Ilmu Agama Islam  
NIM 221241003  
Alamat Jl. Banda Aceh – Medan KM. 31 Lamleupung Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar Prov. Aceh 23363

*\* coret yang tidak perlu*

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang saya ajukan yaitu:  
Analisis Historis Konflik Partai Masyumi dengan Partai Komunis Indonesia (1946–1955)

**adalah hasil karya saya sendiri.** Apabila dikemudian hari terbukti terdapat pelanggaran kaidah-kaidah akademik pada karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi-sanksi yang dijatuhkan karena kesalahan tersebut, sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 18 Januari 2024  
Yang membuat Pernyataan,



Nama Lengkap: Hikmat Maswara  
NIM: 221241003

# **ANALISIS HISTORIS KONFLIK PARTAI MASYUMI DENGAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA (1946–1955)**

**Hikmat Maswara**  
Universitas Paramadina  
maswarahikmat@gmail.com

## **Abstrak**

Sejarah perpolitikan umat Islam Indonesia dimulai saat Partai Masyumi berdiri, namun saat berkiprah dalam pentas politik nasional Partai Masyumi kerap kali memiliki konflik secara tertutup maupun terbuka dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tujuan penelitian ini adalah menelaah lebih jauh mengenai Sejarah Konflik Partai Masyumi dengan Partai Komunis Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kepustakaan dengan menerapkan metode sejarah. Dalam metode sejarah terdapat empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini adalah walaupun Partai Masyumi kerap mendapatkan serangan secara terbuka dari Partai Komunis Indonesia namun tetap mendapatkan dukungan dari masyarakat luas. Simpulan pada penelitian ini adalah kedua partai memiliki ideologi yang berbeda, Masyumi mengusung ideologi Islam, sedangkan Partai Komunis Indonesia mengusung paham komunis, karena dua ideologi tersebut bertentangan menyebabkan konflik keduanya tidak dapat terelakkan.

**Kata kunci:** Sejarah, Konflik, Masyumi, PKI

## **PENDAHULUAN**

Saat dikeluarkannya maklumat X pada tahun 1945 membuka peluang warga Indonesia untuk membentuk partai politik. Kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan oleh umat Islam Indonesia melalui organisasi Masyumi. Akhirnya Masyumi yang merupakan kelanjutan MIAI bertransformasi menjadi partai politik yang berbasiskan ideologi Islam.

Pada satu sisi yang lain, paham komunis pun menyemarakkan pentas politik Indonesia. Partai Komunis Indonesia turut mengambil andil dalam pembentukan partai pada awal kemerdekaan Indonesia. Paham PKI yang begitu bertentangan dengan Masyumi membawa warna tersendiri dalam percaturan sejarah Indonesia.

Berawal berbedanya ideologi sebagai pandangan hidup pastinya akan membawa pada konflik, baik konflik terbuka maupun tertutup. Walaupun ada

beberapa pendapat yang menyatakan bahwa basis massa kedua partai tersebut berbeda, sehingga seharusnya tidak perlu timbul konflik. Namun kenyataan berbeda, berbagai konflik timbul setidaknya selama satu dekade pertama kemerdekaan Indonesia.

Konflik pertama adalah peristiwa PKI Madiun 1948 yang diprakarsai oleh Musso yang menelan korban dari pihak Masyumi. Dilanjutkan dengan turut sertanya peran PKI dalam melengserkan Natsir dari posisi sebagai perdana menteri. Bahkan hingga memunculkan isu terkait kepemilikan tanah anggota Masyumi yang harus dikembalikan atau dirampas kembali oleh negara.

Berbagai polemik tersebut akan diuraikan secara mendalam dan komprehensif pada pembahasan selanjutnya. Uraian tersebut akan ditampilkan berurutan dan sistematis selayaknya hasil karya penelitian sejarah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam penelitian.<sup>1</sup> Pada penelitian kali ini penulis memilih metode penelitian dengan menggunakan metode sejarah. Dalam metode sejarah terdapat empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.<sup>2</sup>

Selanjutnya penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan yang mana penulis hanya melakukan analisa terhadap konten sebuah penelitian terdahulu yang sesuai dengan kebutuhan penuli dalam merampungkan penelitian ini. Sebagai penelitian kepustakaan dituntut melakukan content analisis yaitu menganalisa data-data kepustakaan yang terkait secara ilmiah, yang disampaikan secara deskriptif.<sup>3</sup>

Soetandoyo Wingjosoebroto dalam Koentjaraningrat (1977: 328) menyebutkan bahwa analisis data ialah suatu kegiatan olah data melalui cara pengorganisasian data serta menyusun data dalam suatu pola tertentu, kategorisasi, dan skema dekripsi dasar, sehingga dapat dikemukakan pemahaman tertentu dari hasil tafsiran tersebut. Untuk menganalisa data yang telah terkumpul, penulis menggunakan teknik analisa isi. Sedangkan A. Muri Yusuf menjabarkan bahwa analisa isi (*content analysis*) memiliki arti tindakan menganalisis suatu dokumen atau transkrip yang telah ditulis sebelumnya menggunakan rekaman konumniasi verbal semisal koran, buku, artikel, hasil wawancara, dan dikumen atau arsip yang memiliki nilai historis.<sup>4</sup>

Untuk memahami sejarah konflik Partai Masyumi dengan Partai Komunis Indonesia, penulis membagi tulisan ini ke dalam tiga bagian utama. *Pertama*, pendahuluan sebagai pengantar kajian. *Kedua* yaitu metode penelitian yang

---

<sup>1</sup> Jonathan, LCA. Robin dkk. 2009. *Panduan Praktis Metode Penelitian*. Jakarta: Yayasan Mitra Kasih.

<sup>2</sup> Lubis, Nina Herlina. 2008. *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika.

<sup>3</sup> Wathoni, Lalu Muhammad Nurul. 2020. *Pendidikan Islam Anak Usia Dini: Pendidikan Islam dalam Menyikapi Kontroversi Belajar Membaca Pada Anak Usia Dini*. Mataram: Sanabil.

<sup>4</sup> Yusuf, A. Muri. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media.

meliputi penjelasan metode penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini. *Ketiga*, pembahasan sebagai inti penelitian ni yang akan menjelaskan mengenai sejarah konflik Partai Masyumi dengan Partai Komunis Indonesia. *Keempat*, simpulan sebagai ringkasan dari keseluruhan hasil pembahasan dan analisis yang penulis lakukan.

## **PEMBAHASAN**

### **Sekilas mengenai MIAI dan Masyumi sebagai Organisasi Cikal Bakal Partai Masyumi**

Sebelum membahas mengenai Partai Masyumi alangkah baiknya kita dapat memahami terlebih dahulu tentang MIAI, sebuah organisasi yang didirikan pada zaman Hindia Belanda yang nantinya berlanjut menjadi Partai Masyumi. Sekitar pada bulan September 1937, KH Wahab dari NU menggagas pendirian MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia), sebuah wadah untuk membangun komunikasi dan kerja sama sesama organisasi Islam.<sup>5</sup> Selain diperuntukan sebagai wadah komunikasi serta kerja sama, sebenarnya pendirian MIAI sarat adanya motif perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Kehadiran MIA dianggap sebagai reaksi atas berbagai kebijakan yang dirumuskan Belanda terhadap persoalan keagamaan umat Islam Indonesia.<sup>6</sup>

MIAI sebagai organisasi federasi mewadahi 13 organisasi Islam yang ada di Indonesia, dengan lima besar organisasi utamanya yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persatuan Islam (Persis), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Partai Arab Indonesia.<sup>7</sup> Pola berkumpulnya berbagai organisasi Islam ini menjadikan MIAI sebagai organisasi yang diperhitungkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Hal tersebut terlihat ketika MIAI secara bebas melakukan berbagai kegiatan termasuk melakukan kongres dan mengeluarkan suatu pandangan yang mewakili organisasi tanpa takut terhadap intervensi pemerintah Hindia Belanda. Setidaknya selama MIAI berdiri (1937-1942), organisasi ini telah melaksanakan tiga kongres. Kongres pertama (1938) belangsung di Surabaya dengan agenda utama pembahasan mengenai nasih umat Islam Palestina, kongres kedua (1939) berlansung di Solo dengan agenda melakukan peringatan Isra Mi'raj secara bersama, dan kongres ketiga di Solo (1941) membahas terkait pemulangan muslimin Indonesia yang menderita dari Mekah.<sup>8</sup>

Seiring dengan jatuhnya wilayah Indonesia ke dalam pemerintahan Pendudukan Jepang, sepak terjang MIAI pun mulai terganggu. Hingga pada akhirnya bulan Oktober 1943, pemerintah Pendudukan Jepang secara resmi membubarkan MIAI, namun selanjutnya membentuk federasi baru yang diberi

---

<sup>5</sup> Artawijaya. 2014. *Belajar dari Partai Masjumi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

<sup>6</sup> Hakim, Rahmad. 2020. *Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.

<sup>7</sup> Khamdan, Muh. 2022. *Politik Identitas dan Perebutan Hegemoni Kuasa*. Serang: Penerbit A-Empat.

<sup>8</sup> Amin, Masyhur. 2004. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Indonesia Spirit Foundation.

nama Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) sebagai pengganti.<sup>9</sup> Tetapi dalam langkah pendirian Masyumi oleh pemerintah Jepang bukan serta-merta mendukung kehidupan relegius umat Islam Indonesia, hal ini adalah upaya membangun konsolidasi dan mengambil hati umat Islam Indonesia.

Setelah mendapatkan izin pemerintahan pendudukan Jepang akhirnya Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) secara resmi berdiri pada tahun 1943 sebagai kelanjutan MIAI dengan K.H. Hasyim Asy'ari sebagai ketua umum dan K.H. Wahid Hasyim sebagai ketua II.<sup>10</sup> Pada saat itu kekuatan dari Masyumi sudah terlihat dengan jelas, bahkan hal ini yang akan menjadi modal utama bagi Partai Masyumi nantinya. Bahkan di Pulau Jawa pada setiap karisidenan memiliki perwakilan Masyumi.<sup>11</sup>

Salah satu pergerakan besar yang dilakukan oleh Masyumi adalah pembentukan organisasi sayap yang bersilat militer pada tanggal 14 Oktober 1944, organisasi tersebut diberi nama Barisan Hizbullah (tentara Allah).<sup>12</sup> Pendirian Hizbullah tersebut mendapatkan respon yang amat baik dari Jepang. Namun lagi-lagi hal tersebut bukan semata-mata murni untuk kemajuan organisasi, pendirian Hizbullah disinyair sebagai taktik Jepang untuk menghimpun kekuatan militer cadangan tatkala mereka diserbu oleh tentara pasukan sekutu. Sehingga pelatihan yang diberikan oleh Jepang kepada kaum Muslim adalah dalam rangka mobilisasi perang mereka.<sup>13</sup>

Memasuki tahun 1945 peta perpolitikan dunia semakin tidak menentu, awalnya Jepang merupakan pihak yang ditakuti oleh berbagai negara, termasuk dunia barat. Namun peristiwa balas dendam Amerika Serikat setelah pangkalan perang Pearl Harbour dibom bardir Jepang merubah keadaan, Jepang akhirnya dijatuhi dua bom Atom yaitu di Kota Hiroshima dan Kota Nagasaki. Kondisi tersebut akhirnya memaksa Jepang untuk menyerah tanpa syarat pada 14 Agustus 1945.<sup>14</sup> Hal tersebut akhirnya memicu para pendiri banga yang dipimpin oleh Ir. Soekarno memproklamkan Republik Indonesia pada tang 17 Agustus 1945.

Perjalanan Masyumi memasuki babak baru, pada tahun 1945 organisasi Masyumi beralih menjadi partai politik. Hal ini didasari oleh maklumat yang dikeluarkan pemerintah No. X tanggal 3 November 1945 yang isinya adalah himbauan kepada warga negara untuk membentuk partai politik.<sup>15</sup> Dua pekan setelah keluarnya maklumat tersebut, tepatnya pada tanggal 17 November 1945 melalui Kongres Nasional Umat Islam di Yogyakarta terbentuklah Partai Politik

---

<sup>9</sup> Syafii Maarif, Ahmad. *Percaturan Islam dan politik*. Yogyakarta: Penerbit IRCiSoD.

<sup>10</sup> Tim Walikutub Saklusin 12. 2020. *Sejarah perjuangan Kiai Haji Abdul Wahab, dalam perspektif. Saksi Autentik Sejarah NU*. Sukabumi: CV Jejak.

<sup>11</sup> Aritonang, Jan S. 2004. *Sejarah perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

<sup>12</sup> Hakiem, Lukman. 2022. *Soekiman, sebuah biografi politik pemimpin pertama Partai Masyumi dan kontribusinya untuk Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

<sup>13</sup> Fogg, W. Kevin. 2020. *Spirit Islam Pada Masa Revolusi Indonesia*. Jakarta: Noura Publishing.

<sup>14</sup> Arafat, Yasser dkk. 2020. *Pancasila, Sejarah dan Kedudukannya bagi Bangsa Indonesia*. Malang: Inteligensia Media.

<sup>15</sup> Nurdin, M. Amin dkk. 2019. *Prahara Partai Islam: Komparasi Konflik Internal PPP dan PKS*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Islam Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi).<sup>16</sup> Sejak hari itu sudah resmilah Masyumi masuk dalam dunia perpolitikan di Indonesia.

### **Konflik Partai Masyumi dengan Partai Komunis Indonesia**

Konflik Partai Masyumi dan Partai Komunis Indonesia adalah hal yang menarik untuk dibahas, karena pada saat awal kemerdekaan dua partai tersebut memiliki basis massa yang besar di Indonesia. Bagaimana tidak, dalam suatu negara terdapat partai yang mengusung ideologi agama mayoritas penduduk Indonesia yaitu Islam, di lain sisi harus berdampingan dengan partai yang berpaham komunis, lambat laun pasti akan terjadi gesekan baik secara tersembunyi ataupun konflik terbuka. Ajaran komunisme didasarkan atas kebendaan, maka komunisme tidak percaya kepada adanya Tuhan.<sup>17</sup> Runtutan konflik tersebutlah yang akan diuraikan pada pembahasan di bawah ini.

Dua tahun pertama berdirinya republik ini sebenarnya gesekan antara Masyumi dengan PKI sudah jelas terlihat. Malah keduanya memiliki pemahaman yang bertolak belakang mengenai perjanjian Linggarjati dan Renville. Secara tegas Masyumi menolak perjanjian Linggarjati (1946) dan perjanjian Renville (1947) yang saat itu digaungkan oleh kelompok partai kiri seperti PKI, Partai Sosialis, Pesindo dan Partai Buruh.<sup>18</sup> Masyumi beranggapan bahwa perjanjian Linggarjati dan Renville hanya melemahkan posisi Indonesia di hadapan Belanda. Sedangkan PKI mengutarakan sikap mereka bahwa tegas mendukung perjanjian Linggarjati, karena dianggap sejalan dengan pemahaman Marxis-Leninis, PKI seakan menyamakan perjanjian Linggarjati dengan perjanjian Brest-Litovsk.<sup>19</sup> Perjanjian Brest-Litovsk pada tanggal 3 Maret tahun 1918 adalah perjanjian antara Rusia dengan Jerman demi menghindari Rusia terlibat dalam Perang Dunia I, namun perjanjian tersebut berakibat Rusia kehilangan banyak wilayahnya di wilayah Eropa Barat.<sup>20</sup> Namun dalam perkara ini sangat disayangkan sekali, perpecahan justru terjadi pada kalangan Masyumi. Masyumi secara partai menolak dengan tegas perundingan Linggarjati dan Renville, namun kadernya dalam pemerintahan justru ikut mendukung dan mengatasnamakan keputusan pribadi. Akhirnya Mr. Muhammad Roem, Mr. Syafruddin Prawiranegara, Muhammad Natsir digolongkan sebagai Masyumi yang mendukung perundingan Linggarjati, adapun Dr. Sukirman, Mr. Jusuf Wibisono, Mr. Kasman Singadimedjo tetap teguh pendirian menolak perundingan Linggarjati.<sup>21</sup>

Memasuki tahun 1948, ketegangan antara Masyumi dan PKI merambah pada konflik fisik. PKI di bawah pimpinan Musso melancarkan aksi militan di Madiun pada tahun 1948. Berbagai aksi yang dilancarkan oleh PKI menyebabkan ketegangan antara PKI dengan angkatan perang dan para santri simpatian Masyumi. Berbagai aksi yang dilakukan menimbulkan ketegangan dengan

---

<sup>16</sup> Luth, Thohir. 1999. *M. Natsir, Dakwah dan Pemikirannya*. Bandung: Gema Insani.

<sup>17</sup> Damri, dkk. 2020. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Prenada Media Group.

<sup>18</sup> Mashad, Dhurorudin. 2021. *Politik Kaum Santri dan Abangan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

<sup>19</sup> Rambe. 2003. *Pemikiran Politik Tan Malaka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<sup>20</sup> Ja'far, Marwan. 2009. *Energynomics: Ideologi Baru Dunia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

<sup>21</sup> Zuhri, Saifuddin. 2013. *Berangkat Dari Pesantren*. Yogyakarta: LKIS.

angkatan perang dan golongan santri anggota Masyumi.<sup>22</sup> Dalam kesaksian menteri PP dan K Ali Sastroamidjojo ketika pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948, ia menyaksikan begitu banyak tokoh Masyumi dan partainya (PNI) dibantai oleh pengikut-pengikut Musso.<sup>23</sup> Ketegangan mereda setelah tentara yang dipimpin Letnan Kolonel Dachlan mengambil alih kota Madiun. Lalu Musso sang pemimpin pemberontakan PKI Madiun ditembak mati, kemudian mayatnya dibakar dan dipertontonkan di Ponorogo.<sup>24</sup>

Satu tahun setelah kejadian pemberontakan PKI Musso di Madiun, PKI mengalami kemorotan yang besar dan mendapatkan serangan dari berbagai musuh politiknya.<sup>25</sup> Sementara itu, dalam tubuh Masyumi terjadi gerakan yang menginginkan bergantinya pucuk pimpinan partai. Ketua Umum Masyumi Soekiman yang telah memimpin Masyumi sejak awal berdiri pada tahun 1945 dianggap sudah tua dan harus diganti. Akhirnya aspirasi tersebut terwujud, Soekiman digantikan oleh tokoh Masyumi yang lebih muda yaitu Natsir. Mohammad Natsir terpilih menjadi Ketua Pimpinan Pusat Partai Islam Masyumi dalam Mukhtar IV yang diselenggarakan di Yogyakarta pada 15-19 Desember 1949.<sup>26</sup>

Pergerakan Masyumi kembali mencatat sejarah saat Natsir mengemukakan ide Mosi Integral (1950), Mosi Integral itulah yang membawa Indonesia menjadi negara kesatuan hingga saat ini. Peristiwa mosi integral yang digagas oleh Natsir bisa diklaim sebagai hari jadi NKRI, yang kesepakatannya ditandatangani oleh 11 fraksi Parlemen RIS.<sup>27</sup> Dalam gagasan mosi integral kita dapat menyaksikan bagaimana Masyumi dan PKI sepakat dalam satu pandangan, hal ini terlihat ketika PKI menyetujui mosi tersebut.<sup>28</sup>

Badai kencang pada tahun 1951 menerpa Masyumi, Natsir yang sedang menjadi perdana menteri digoyang dari posisinya. Kekecewaan terhadap Natsir dipicu terkait kebijakannya terhadap Irian Barat. Kekecewaan pun timbul pula dari Soekarno yang menginginkan dilancarkan operasi militer pembebasan Irian Barat, namun Natsir sebagai perdana menteri menolak gagasan Soekarno tersebut dan menginginkan menemukan titik temu melalui jalur perundingan.<sup>29</sup> PKI yang membaca situasi ketegangan antara Natsir dan Soekarno mengambil posisi seolah-olah golongan komunis itu sangat mendukung politik Bung Karno.<sup>30</sup> Karena permasalahan tersebut Kabinet Natsir harus berakhir dengan masa kepemimpinan selama tujuh bulan.

Badai kencang yang kedua menerpa pada tahun 1952, bahkan lebih kencang dari sebelumnya, pasalnya NU sebagai organisasi Islam terbesar di

---

<sup>22</sup> Samandawai, Sofyan. 2001. *Mikung*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.

<sup>23</sup> Bashri, Yanto. 2005. *Sejarah Tokoh Bangsa*. Yogyakarta : Pustaka Tokoh Bangsa.

<sup>24</sup> Hadi, Usman. 2017. *Bung Karno: Sang Nasionalis Sejati*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.

<sup>25</sup> Salim, Agus. 2009. *Tragedi Fajar*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.

<sup>26</sup> Dzulfikriddin, M. 2010. *Mohammad Natsir Dalam Sejarah Politik Indonesia*. Bandung: Mizan.

<sup>27</sup> Khamdan, Muh. 2022. *Politik Identitas dan Perebutan Hegemoni Kuasa*. Serang: Penerbit A-Empat.

<sup>28</sup> Jurdi, Furqan. 2020. *Api Kata-Kata*. Bandung: Rasibook.

<sup>29</sup> Mimbar Hukum - Volume 14. 2003. Jakarta: Yayasan Pembinaan Masyarakat Islam AL Hikmah.

<sup>30</sup> Alam, Wawan Tunggul. 2003. *Demi Bangsa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.



Indonesia yang sedari awal turut andil dalam pendirian Partai Masyumi menyatakan keluar dari kepengurusan. Ada dua hal yang menjadi alasan kenapa NU keluar dari Partai Masyumi, yaitu tidak dianggapnya Majelis Syuro sebagai majelis tertinggi partai dan penempatan menteri agama dari golongan Muhammadiyah saat pembentukan Kabinet Wilopo.<sup>31</sup> Saat kemelut antara NU-Masyumi terjadi, PKI kembali mengambil posisi untuk menyerang Masyumi. PKI melakukan manuver dengan mengajak partai-partai untuk membentuk suatu kabinet tanpa Masyumi.<sup>32</sup> Walaupun pada akhirnya PM Wilopo tetap memasukkan kader Masyumi dalam kabinetnya, manuver PKI tersebut merupakan konflik nyata kedua kalinya antara Masyumi dengan PKI setelah sebelumnya terjadi peristiwa pemberontakan PKI Madiun 1948.

Konflik terbuka selanjutnya terjadi pada tahun 1953 terkait isu kepemilikan tanah yang dimiliki oleh para anggota Masyumi. PKI menyebarkan isu mengenai anggota Masyumi yang memiliki tanah dengan jumlah yang luas (tuan tanah) agar disita oleh negara, hal tersebut adalah propaganda program agraria dan kampanye PKI.<sup>33</sup> Tentu saja isu yang dihembuskan oleh PKI tersebut mengguncang kondisi Partai Masyumi. Masyarakat setidaknya menganggap bahwa Partai Masyumi tidak mencerminkan Islam karena hidup bergelimang harta yang sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena ingat bahwa PKI menyatakan negara harus merampas tanah tersebut. Pada sisi lainnya Partai Masyumi baru kehilangan NU dalam tubuhnya, ini pun semakin menambah kemerosotan pendukung partai di tengah masyarakat, padahal pemilihan umum akan diselenggarakan dua tahun berikutnya (Pemilu 1955).

Momentum konsolidasi partai terjadi ketika meletusnya peristiwa kerusuhan golongan tani di daerah Tanjung Morawa Sumatera Utara pada tanggal 6 Juni 1953.<sup>34</sup> Kerusuhan yang digerakkan oleh kader PKI tersebut berujung pada jatuhnya kabinet Wilopo, kesuksesan gerakan ini memompa semangat internal partai. Kepopuleran PKI di kalangan tani semakin menjulang, bahkan selain dari golongan tani, PKI pun mendapat respon positif dari kalangan buruh. Hal tersebut lebih dari cukup sebagai modal untuk mengikuti kontestasi politik tahun 1955. Menyadari pengaruh komunis yang semakin meluas menyebabkan anggota Masyumi mengambil tindakan tegas, gerakan ini berasal bukan dari pusat pimpinan partai, namun berasal dari kepengurusan daerah. Kita dapat mengambil contoh tatkala Isa Anshari (ketua Masyumi wilayah Jawa Barat) membuat Front Anti-Komunis pada tahun 1954 yang menyebarkan propaganda - propaganda anti komunis di tengah masyarakat.<sup>35</sup> Plang papan nama Front Anti-Komunis akhirnya terpampang di depan kantor Masyumi pusat, sontak hal tersebut mendapat respon dari D.N Aidit selaku ketua PKI. Aidit menyatakan bahwa tidak ingin terprovokai

---

<sup>31</sup> Safitri, Dini. 2019. *Wacana Pedagogi Islam Nusantara*. Sukoharjo: Kekata Group.

<sup>32</sup> Sucipto, Herman Dwi. 2015. *Mengurai Kabut Pekat Dalang G30S*. Yogyakarta: Palapa.

<sup>33</sup> Abdullah, Taufik. 2012. *Malam Bencana 1965 Dalam Belitan Krisis Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

<sup>34</sup> Tim TEMPO. 2010. *Aidit: Dua Wajah Dipa Nusantara*. Jakarta: KPG.

<sup>35</sup> Gunawan, Hendra. 2000. *M. Natsir dan Darul Islam*. Jakarta: Media Da'wah.

dengan adanya gerakan Front-Anti Komunis, lalu tidak membalas juga dengan mendirikan Front Anti-Masyumi atau bahkan Front Anti-Islam.<sup>36</sup>

Saat pemilu pertama tahun 1955 berlangsung, sesungguhnya itu adalah pembuktian yang nyata terkait persaingan Masyumi dengan PKI. Dapat disimpulkan posisi massa pendukung partai masing-masing dalam republik ini, sehingga dapat kita lihat pula massa lebih berempati pada pihak yang mana. Hasil pemilu tahun 1955 menunjukkan bahwa PNI keluar sebagai pemenang, disusul oleh masyumi urutan kedua, Partai Nu urutan ketiga, dan PKI menempati urutan keempat.<sup>37</sup> Dapat kita simpulkan bahwa konflik terbuka yang terjadi antara Masyumi dengan PKI dapat dikatakan dimenangkan oleh Masyumi, terlebih perlu kita ingat yaitu sebelum NU mendirikan partai tersendiri Partai NU adalah bagian dari Masyumi. Sehingga jika keretakan antara NU-Masyumi tidak terjadi pada tahun 1952, kemungkinan besar pemilu 1955 dapat dimenangkan secara mutlak oleh Masyumi.

## **KESIMPULAN**

Sejarah mencatat sedari konflik pertama yaitu terkait silang pendapat mengenai perjanjian Linggarjati hingga dibentuknya Front Anti-Komunis oleh anggota Partai Masyumi tidak menyebabkan Masyumi mengalami kemerosotan. Bahkan ketika hasil Pemilu 1955 diumumkan, Masyumi meraih posisi kedua hanya terpaut sedikit dengan raihan suara PNI. Sedangkan PKI yang telah bersusah payah membangun kekuatan dengan berbagai macam cara, hingga menggalang kekuatan dari berbagai kalangan seperti tani dan buruh hanya menempati urutan keempat.

Konflik tertutup maupun terbuka yang terjadi antara Partai Masyumi dengan Partai Komunis Indonesia terjadi karena adanya benturan ideologi masing-masing partai. Partai Masyumi yang memiliki ideologi Islam berpandangan bahwa paham komunis yang diusung oleh PKI berbahaya dan membahayakan rakyat. Dilain pihak PKI menganggap basis Masyumi yang besar harus direbut agar dapat menguasai jalannya pemerintahan. Hal tersebut menyebabkan konflik antara keduanya tidak dapat terelakkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Taufik. 2012. *Malam Bencana 1965 Dalam Belitan Krisis Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Alam, Wawan Tunggul. 2003. *Demi Bangsa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Amin, Masyhur. 2004. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Indonesia Spirit Foundation.

---

<sup>36</sup> Pour, Julius. 2010. *Gerakan 30 September*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

<sup>37</sup> Santoso, Topo. 2019. *Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Arafat, Yasser dkk. 2020. *Pancasila, Sejarah dan Kedudukannya bagi Bangsa Indonesia*. Malang: Inteligencia Media.
- Aritonang, Jan S. 2004. *Sejarah perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Artawijaya. 2014. *Belajar dari Partai Masjumi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Bashri, Yanto. 2005. *Sejarah Tokoh Bangsa*. Yogyakarta : Pustaka Tokoh Bangsa.
- Damri, dkk. 2020. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dzulfikriddin, M. 2010. *Mohammad Natsir Dalam Sejarah Politik Indonesia*. Bandung: Mizan
- Fogg, W. Kevin. 2020. *Spirit Islam Pada Masa Revolusi Indonesia*. Jakarta: Noura Publishing
- Gunawan, Hendra. 2000. *M. Natsir dan Darul Islam*. Jakarta: Media Da'wah.
- Hadi, Usman. 2017. *Bung Karno: Sang Nasionalis Sejati*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Hakim, Lukman. 2022. *Soekiman, sebuah biografi politik pemimpin pertama Partai Masyumi dan kontribusinya untuk Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Hakim, Rahmad. 2020. *Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana
- Ja'far, Marwan. 2009. *Energynomics: Ideologi Baru Dunia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Jonathan, LCA. Robin dkk. 2009. *Panduan Praktis Metode Penelitian*. Jakarta: Yayasan Mitra Kasih.
- Jurdi, Furqan. 2020. *Api Kata-Kata*. Bandung: Rasibook.
- Khamdan, Muh. 2022. *Politik Identitas dan Perebutan Hegemoni Kuasa*. Serang: Penerbit A-Empat.
- Lubis, Nina Herlina. 2008. *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- Luth, Thohir. 1999. *M. Natsir, Dakwah dan Pemikirannya*. Bandung: Gema Insani

- Mashad, Dhurorudin. 2021. *Politik Kaum Santri dan Abangan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Mimbar Hukum - Volume 14. 2003. Jakarta: Yayasan Pembinaan Masyarakat Islam AL Hikmah.
- Nurdin, M. Amin dkk. 2019. *Prahara Partai Islam: Komparasi Konflik Internal PPP dan PKS*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Pour, Julius. 2010. *Gerakan 30 September*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rambe. 2003. *Pemikiran Politik Tan Malaka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Safitri, Dini. 2019. *Wacana Pedagogi Islam Nusantara*. Sukoharjo: Kekata Group.
- Salim, Agus. 2009. *Tragedi Fajar*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Samandawai, Sofyan. 2001. *Mikung*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Santoso, Topo. 2019. *Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sucipto, Herman Dwi. 2015. *Mengurai Kabut Pekat Dalang G30S*. Yogyakarta: Palapa
- Syafii Maarif, Ahmad. *Percaturan Islam dan politik*. Yogyakarta: Penerbit IRCiSoD.
- Tim TEMPO. 2010. *Audit: Dua Wajah Dipa Nusantara*. Jakarta: KPG.
- Tim Walikutub Saklusin 12. 2020. *Sejarah perjuangan Kiai Haji Abdul Wahab, dalam perspektif. Saksi Autentik Sejarah NU*. Sukabumi: CV Jejak.
- Wathoni, Lalu Muhammad Nurul. 2020. *Pendidikan Islam Anak Usia Dini: Pendidikan Islam dalam Menyikapi Kontroversi Belajar Membaca Pada Anak Usia Dini*. Mataram: Sanabil.
- Yusuf, A. Muri. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media.
- Zuhri, Saifuddin. 2013. *Berangkat Dari Pesantren*. Yogyakarta: LKIS.